



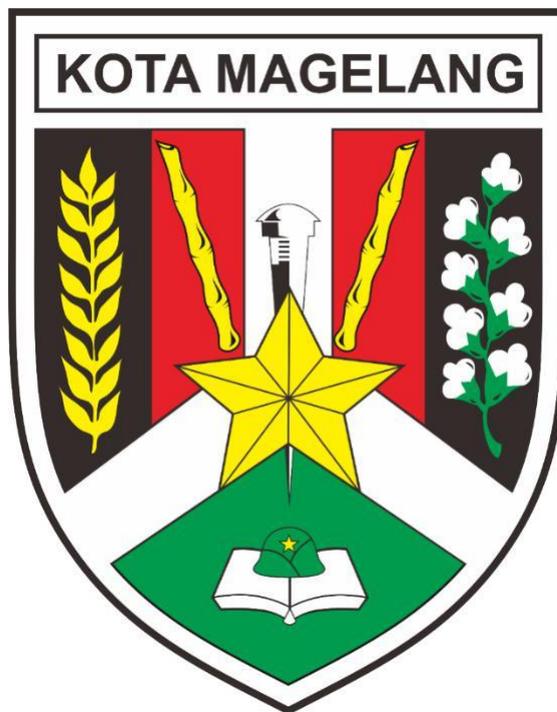
# RENCANA KERJA 2024



**dpmptsp**  
Kota Magelang

JL VETERAN NO 7 KOTA MAGELANG  
WEBSITE: <https://dpmptsp.magelangkota.go.id/>  
SMS Center 0857-9999-6000  
56117

**RENCANA KERJA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA**  
**MAGELANG**  
**TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun Anggaran 2024** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disamping berfungsi sebagai

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Magelang, 7 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**RISSHOIFAH, SH, MM**

NIP. 19650827 199003 2 005

Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU11</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	29
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.3.1 Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	37
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	38
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program	40
2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024	41
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	49
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>50</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	52
3.3 Program dan Kegiatan	554
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>64</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program /Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	17
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 Kota Magelang	19
Tabel 2.3 Sasaran Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	32
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Magelang	44
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Magelang	49
Tabel 3.1 Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang	51
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	53
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraaan Maju Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	55
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	65

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan hubungan dengan RKPD

3

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

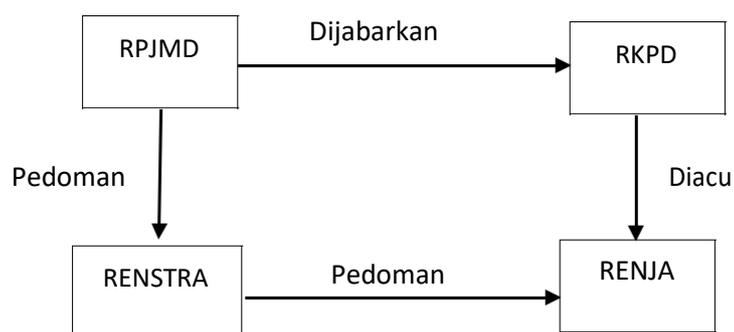
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; pembahasan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

untuk tahun Ke dua periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2024, Renstra Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2, Renja Kementerian Investasi dan Renja Provinsi Jawa Tengah. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keterkaitan hubungan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dengan RKPD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Bagan Keterkaitan hubungan dengan RKPD

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor Registrasi Pearturan daerah Provinsi Jawa Tengah: (5-69/2019));
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 4).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang 2024 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.

- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2024 meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
- 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2024.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dari hasil evaluasi yang belum mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator kinerja Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas belum dapat mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Masih ada alur proses pelayanan perizinan yang diluar wewenang perangkat daerah yang masih dihitung dalam lama proses pelayanan perizinan yaitu pada izin reklame.
2. Petugas pelayanan belum mematuhi lama waktu proses perizinan yang sudah ditetapkan pada SOP perizinan dan nonperizinan.

Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan indikator Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD, kegiatan administrasi umum OPD dengan indikator terlaksananya tertib administrasi Umum OPD, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator Terpenuhinya jasa penunjang kantor, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jumlah barang milik daerah yang dipelihara dan kegiatan penataan organisasi dengan indikator tersusunnya laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Program promosi penanaman modal dengan indikator Persentase LOI yang ditindaklanjuti.
3. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP. Serta kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan indikator Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya

Beberapa program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan, realisasi anggaran sampai evaluasi capaian kinerja.
2. Koordinasi internal dan koordinasi dengan dinas terkait yang intens dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan realisasi keuangan sampai evaluasi capain kinerja.
3. Seluruh calon investor yang menyatakan kepeminatan memiliki respon yang baik dan kooperatif untuk melanjutkan proses kepeminatan hingga dapat terealisasi investasinya di Kota Magelang
4. Seluruh pelaku usaha yang mendapatkan insentif/fasilitasi penanaman modal telah memanfaatkan pemberian insentif dengan baik.
5. Pemetaan peta potensi dan peluang investasi telah dapat dilaksanakan pada 2 (Dua) kecamatan yang menjadi bahan promosi penanaman modal.

Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang – undangan dan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota dengan indikator kinerja Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM.

2. Program pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Investor PMA/PMDN.
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM dan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota dengan indikator Persentase pengelolaan data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik.
4. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang dilayani.
5. Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI).

Beberapa program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas yang capaiannya melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pendampingan, pengawasan, sosialisasi dan bimbingan teknis LKPM kepada pelaku usaha berjalan dengan efektif.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan legalitas usaha terutama pada UMKM.
3. Meningkatnya kebutuhan informasi penanaman modal oleh masyarakat dan meningkatnya publikasi data dan informasi penanaman modal.
4. Pembangunan sistem informasi rekapitulasi data dan sistem informasi potensi dan peluang investasi.

5. Dilakukan inventarisasi izin yang dikelola oleh OPD dan telah didelegasikan ke DPMPTSP.
6. Meningkatnya minat pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kota Magelang terutama pada lahan swasta.
7. Fasilitasi kepeminatan investasi dari para calon investor.
8. Monitoring dan Evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang.

**Tabel 2.1**  
**Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang**

<b>No.</b>	<b>Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak sesuai Target</b>	<b>Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target</b>	<b>Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target</b>	<b>Solusi yang dilakukan</b>
1.	Masih ada alur proses pelayanan perizinan yang diluar wewenang perangkat daerah yang masih dihitung dalam lama proses pelayanan perizinan yaitu pada izin reklame	Meningkatnya pemahaman pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan, realisasi anggaran sampai evaluasi capaian kinerja	Pendampingan, pengawasan, sosialisasi dan bimbingan teknis LKPM kepada pelaku usaha berjalan dengan efektif	Melakukan review dokumen SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan
2.	Petugas pelayanan belum mematuhi lama waktu proses perizinan yang sudah ditetapkan pada SOP perizinan dan nonperizinan	Koordinasi internal dan koordinasi dengan dinas terkait yang intens dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan realisasi keuangan sampai evaluasi capain kinerja	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan legalitas usaha terutama pada UMKM	Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal serta peningkatan kompetensi pegawai
3.		Seluruh calon investor yang menyatakan kepeminatan memiliki respon yang baik dan kooperatif untuk melanjutkan proses kepeminatan hingga dapat terealisasi investasinya di Kota Magelang	Meningkatnya kebutuhan informasi penanaman modal oleh masyarakat dan meningkatnya publikasi data dan informasi penanaman modal	Melaksanakan pemetaan peta potensi investasi secara menyeluruh dan dipublikasikan secara luas melalui berbagai media offline dan online
4.		Seluruh pelaku usaha yang mendapatkan insentif/fasilitas penanaman modal telah memanfaatkan pemberian insentif dengan baik	Pembangunan sistem informasi rekapitulasi data dan sistem informasi potensi dan peluang investasi	Optimalisasi monitoring dan evaluasi penerima insentif/fasilitas penanaman modal dan pemanfaatan sistem informasi untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan informasi

5.		Pemetaan peta potensi dan peluang investasi telah dapat dilaksanakan pada 2 (Dua) kecamatan yang menjadi bahan promosi penanaman modal	Dilakukan inventarisasi izin yang dikelola oleh OPD dan telah didelegasikan ke DPMPTSP	Melakukan penyesuaian SK jenis izin yang didelegasikan ke DPMPTSP. Melakukan pemetaan potensi dan peluang investasi secara menyeluruh baik milik pemerintah maupun swasta
6.			Meningkatnya minat pelaku usaha untuk menanamkan modal di Kota Magelang terutama pada lahan swasta	Menyiapkan potensi dan peluang investasi yang clean dan clear.

*Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang*

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023**  
**Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	<b>18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>											
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	148.15%	29.63%		
1	8	01	2	01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	11 Dokumen	27.5%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	20%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		RKA-SKPD										
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah dokumen DPA KPD yang disusun	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	40%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	20%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 dokumen	40%	
2	18	01	2	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersusunnya laporan administrasi keuangan OPD	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	22 Laporan	36.67%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	26 Orang	26 Orang	100%	24 orang	21 orang	40%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 laporan	40%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan dan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	19 Laporan	29.23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	semesteran OPD yang disusun												
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	40%				
2	18	01	2	06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya tertib administrasi Umum OPD	7 kegiatan		7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	7 Kegiatan	7 Kegiatan	40%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang disediakan komponen instalasi listrik/ peneran gannya	13 Ruangan		13 Ruangan	30 ruangan	231%	7 Paket	37 Paket	56%				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ASN dan THL yang disediakan makan minumnya	44 Orang		44 orang	44 orang	100%	5 Paket	5 Paket	40%				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak	7 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Paket	10 Paket	40%				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	2 Jenis		2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	4 Jenis	40%				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan material pembersih kantor yang tersedia	23 Jenis		23 Jenis	23 jenis	100%	23 Jenis	41 Jenis	35.6%				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	10 Kunjungan		15 Kunjungan	31 Kunjungan	207%	12 Laporan	18 Laporan	30%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	35 Kegiatan		35 Kegiatan	35 Kegiatan	100%	12 Laporan	18 Laporan	30%			
2	18	01	2	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya jasa penunjang kantor	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	6 Kegiatan	40%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	20 Surat		35 Surat	52 Surat	149%	12 Laporan	18 Laporan	30%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	4 Rekening		4 Rekening	4 Rekening	100%	12 Laporan	18 Laporan	30%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	17 Orang		10 Orang	10 Orang	100%	12 Laporan	18 Laporan	30%
2	18	01	2	07	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	8 Jenis	40%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan dinas yang terpelihara	18 Kendaraan		18 Kendaraan	18 Kendaraan	100%	18 Unit	18 unit	40%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan operasional lapangan dinas yang dipelihara	5 Kendaraan		5 Kendaraan	5 Kendaraan	100%	5 Unit	5 unit	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara	5 Buah		5 Buah	5 Buah	100%	1 Unit	6 unit	40%				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesinnya yang terpelihara	20 Unit		21 Unit	26 Unit	124%	15 Unit	40 Unit	50%				
2	18	01	2	09	<b>Penataan Organisasi</b>	Tersusunnya laporan pelaksanaan reformasi birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1	20%
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan peningkatan kinerja organisasi yang tersusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1	20%
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Investor PMA/PMDN	100%		100%	220.83%	220.83%	100%	457.02%	91.4%
2	18	02	2	01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota</b>	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	100%		100%	100%	100%	100%	100%	20%
					Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM yang ditetapkan	2 Raperda		-	-	-	1 Dokumen	1 dokumen	10%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dievaluasi pemberian fasilitas/ insentif dan Kemudahan PM nya	10 Perusahaan		2 Perusahaan	3 Perusahaan	100%	3 Perusahaan	3 Perusahaan	30%
2 18 02 2 02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota</b>	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	100%		20%	20%	100%	40%	40%	40%
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan yang terkait penanaman modal yang tersusun	8 Dokumen		4 dokumen	5 dokumen	125%	1 dokumen	6 dokumen	75%
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	Jumlah dokumen profil potensi dan peluang investasi yang ditetapkan	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	40%
2 18 03	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	200%	40%
2 18 03 2 01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase peningkatan jumlah kepedmintaan (LOI)	50%		10%	300%	3000%	10%	316.67%	633%
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi promosi PM yang disusun	6 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	20%
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	23 Kegiatan		4 LOI	6 LOI	150%	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota		2 dokumen	4 dokumen	6 dokumen		5 dokumen	13 dokumen	32.5%			
2	18	04			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	95.5%	93,5%	82.64%	88.36%	94%	92.83%	91.87%
2	18	04	2	01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non - Perizinan yang dilayani	100%	80%	94.66%	118.32%	85%	194.66%	97.33%
					Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non - perizinan yang dilayani secara elektronik	4750 Izin	2000 izin	2678 izin	134%	2500 izin	4341 izin	91.39%
					Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan yang dipantau pemenuhan komitmennya	1500 Izin	150 izin	157 Izin	105%	150 izin	212	14.13%
					Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah layanan konsultasi dan penanganan pengaduan	150 Pemohon	250 Pemohon	383 Pemohon	153%	260 Pemohon	728 Pemohon	485.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	yang ditindaklanjuti								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah kepada Pelaku Usaha	10 Perusahaan		2 Perusahaan	3 Perusahaan	150%	2 Perusahaan	3 Perusahaan	30%
2	18	05								
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan	35%		15%	24.46%	163.07%	20%	30.74%	87.82%
2	18	05	2	01						
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	70%		50%	128.13%	256.26%	55%	78.55%	112.2%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modalnya	425 Perusahaan		100 Perusahaan	100 Perusahaan	100%	-	100 Perusahaan	23.5%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal	550 Perusahaan		262 Perusahaan	309 Perusahaan	118%	362 Perusahaan	405 Perusahaan	73.63%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan	450 Perusahaan		100 Perusahaan	100 Perusahaan	100%	100 Perusahaan	131 Perusahaan	29.11%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dikaji dan dimanfaatkan								

Magelang, Juli 2023  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kota Magelang



**KHUDHOIFAH, SH, MM**  
 NIP. 19650827 199003 2 005  
 Pembina Utama Muda

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 3**  
**Sasaran Strategi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan dan nonperizinan	Rata-rata lama waktu pelayanan perijinan	4.5 hari	2.74 hari	139 %
Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	3	16	533.33 %
Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	70	79.55	113,64 %

Untuk realisasi Indikator kinerja rata-rata lama waktu pelayanan perijinan melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian 139% hal tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan antara lain dengan digunakannya sistem perizinan yang terintegrasi dan dapat diakses secara online, selain itu juga dibangun aplikasi-aplikasi pendukung antara lain aplikasi IKM online, antrian online, pengaduan online, publikasi data dan informasi penanaman modal dan penambahan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan semua layanan di satu tempat sehingga memberikan kemudahan dalam mengajukan layanan perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Indikator kinerja jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) juga jauh melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 533.33% yang dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan legalitas izin usaha terutama untuk UMKM. Kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan investor antara lain dengan : pemetaan peluang dan potensi investasi, pelaksanaan promosi penanaman modal, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan yang berjalan efektif, pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha secara optimal dan tersedianya sistem OSS terintegrasi yang memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan penanaman modal. Sedangkan untuk indikator kinerja nilai SAKIP yang memiliki capaian 113.64% dari target yang telah ditetapkan hal tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas melalui koordinasi internal yang intens dan penyesuaian yang cepat terhadap kebijakan dan regulasi baru. Evaluasi kinerja dan keuangan yang mendorong pencapaian tujuan organisasi dan menjadi pedoman

dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Serta fasilitasi terhadap kebutuhan internal yang memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Penanaman Modal, disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Magelang**

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pertumbuhan nilai investasi PMA/PMDN			16%	16%	16%	16%	41.37%	44.04%	16%	16%	
3.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)			3	3	3	3	16	2	3	3	
4.	IKM Pelayanan Perizinan			83.5	83,5	84	84.5	95.41	90.63	95	95	
5.	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan			4,5 Hari	4 Hari	3,5 Hari	3 Hari	2.74 Hari	2.8 Hari	3 Hari	3 Hari	Dilaksanakan perubahan alur proses pelayanan perizinan non berusaha yang tidak menggunakan proses survey
8.	Nilai SAKIP			70	70	71	72	79.55	81.85	80	81	
9.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman		Permendagri 18/2020	-	1	-	-	3	1	-	-	Perwal mengenai pemberian Fasilitas/ Insentif PM sudah dibuat di tahun 2020 dan akan

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota											dirubah menjadi Perda pada tahun 2023
10.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal		Permendagri 18/2020	1	1	1	1	1	1	-	-	SOP pemberian Insentif sudah dibuat pada tahun 2020 dan masih digunakan
11.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Permendagri 18/2020	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	Laporan evaluasi dibuat pada akhir tahun berikutnya
12.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Permendagri 18/2020	1	1	1	1	2	-	1	1	
13.	Kegiatan pameran penanaman modal		Permendagri 18/2020	2	4	5	6	1	1	2	2	Mempertimbangkan kondisi anggaran
14.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Permendagri 18/2020	1	1	1	1	-	-	-	-	

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15.	Konsultasi perizinan dan non perizinan Penanaman modal		Permendagri 18/2020	10	15	20	25	282	345	300 Pemohon	300 Pemohon	Konsultasi pengajuan perizinan berusaha melalui OSS masih banyak dilakukan oleh pemohon izin
16.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Permendagri 18/2020	800	900	1000	1100	2808	1663	2500 Izin	2500 Izin	Perizinan OSS terbagi dalam beberapa segmen dari UMKM sampai perusahaan besar
17.	Laporan realisasi penanaman modal		Permendagri 18/2020	25	30	35	40	823.515.425.921	252.071.857.782	70 Perusahaan	70 Perusahaan	Kesadaran perusahaan untuk melaksanakan LKPM meningkat
18.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		Permendagri 18/2020	1	1	1	1	5	-	3 ASN	3 ASN	Pembinaan aparatur diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai
19.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Permendagri 18/2020	100	105	110	115	100	96	300 Perusahaan	300 Perusahaan	Pelaksanaan pembinaan penanaman modal masih didukung DAK
20.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota		Permendagri 18/2020	30	32	34	36	10	10	10	10	

### 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lengkap, terintegrasi, modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dokumen perizinan yang diperoleh di satu tempat. Dokumen perizinan tersebut antara lain: KTP, SIM, Paspor, Pajak kendaraan, PBG, perizinan berusaha, dll.
2. Meningkatkan sinergitas dengan perangkat daerah teknis untuk pemuktahiran peraturan perundangan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sehingga proses perizinan berusaha dapat dilayani dengan cepat, mudah dan transparan.
3. Meningkatkan Kompetensi petugas pelayanan, perangkat dinas Teknis yang terkait maupun pemahaman masyarakat terhadap **implementasi OSS RBA** dalam pelaksanaan perizinan berusaha sehingga proses perizinan berusaha akan menjadi mudah dan cepat .
4. Meningkatkan daya saing ekonomi dan iklim investasi  
Daya saing merupakan kemampuan untuk dapat memiliki daya tarik sehingga akan memiliki nilai lebih tersendiri di dalam suatu persaingan. Daya saing daerah menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan

dengan daerah lainnya. Terdapat 3 (tiga) komponen yang sangat berpengaruh:

- a. Kondusifitas wilayah berpengaruh pada keberanian investor untuk berinvestasi dengan memperhatikan dinamika angka kriminalitas beserta faktor pendukung lain yang menjamin kenyamanan berinvestasi. Di Kota Magelang, terus dilakukan upaya untuk menekan angka kriminalitas, serta didukung dengan peningkatan kualitas iman taqwa, dan religiusitas masyarakat
- b. Keunggulan Komparatif lebih mengarah kepada bagaimana suatu daerah memanfaatkan keunggulan yang dimiliki di berbagai sektor untuk bersaing dengan daerah sekitar. Termasuk dalam hal ini keunggulan produk UMKM yang terus dilakukan pembinaan pada peningkatan kualitas produk dan kemasan, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM sehingga menjadi lebih berani berinovasi terhadap produknya.
- c. Keunggulan kompetitif dengan indikator :
  - 1) makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja. Untuk mengatasi bonus demografi maka perlu dibukanya peluang kerja sebesar-besarnya.
  - 2) kualitas infrastruktur, yang dalam hal ini, infrastruktur Kota Magelang sudah terjaga untuk selalu dalam kondisi baik.
  - 3) kesehatan dan pendidikan dasar, yang tercermin dengan nilai IPM yang meskipun semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun tetap diupayakan untuk peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanannya dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas.

5. Pengarusutamaan Gender

DPMPTSP Kota Magelang juga bersinergi untuk pencapaian tujuan lain seperti kesetaraan gender. Dimana dalam penyusunan dokumen perencanaan DPMPTSP juga menyusun GBS (Gender Budget Statement) dan GAP (Gender Analysis Pathway) dan dalam menjalankan tugas pokok fungsi pelayanan

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2023 telah dilakukan pembaharuan roadmap reformasi birokrasi yang lebih berdampak kepada masyarakat dan terbagi dalam beberapa klaster yaitu reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, reformasi birokrasi tematik digitalisasi administrasi pemerintahan dan reformasi birokrasi tematik prioritas presiden. Reformasi Birokrasi tematik khususnya peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing. Untuk dapat meningkatkan investasi perlu dilakukan beberapa perbaikan antara lain pada proses bisnis, data, regulasi kebijakan, penyediaan dukungan teknologi informasi serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

### **2.3.1 Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang difokuskan pada pelayanan penanaman modal yang dapat meningkatkan realisasi investasi.

### **2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat karena sistem yang digunakan dalam pelayanan perizinan baik untuk perizinan berusaha maupun non berusaha

masih terus dikembangkan, sehingga perlu pemahaman dari seluruh pihak yang terkait, yaitu seluruh petugas pelayanan, dinas teknis yang terkait maupun pemohon atau masyarakat yang mengajukan perizinan. Selain terkait sistem yang digunakan dalam proses pelayanan perizinan, regulasi- regulasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan juga perlu dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

- b. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi Penanaman Modal yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara umum maupun untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi pada lingkup internal.
- c. Belum optimalnya pelaku usaha yang melaksanakan LKPM Sebagian besar pelaku usaha belum melaksanakan kewajiban LKPM yang terkendala oleh pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme pelaporan melalui sistem OSS.
- d. Belum optimalnya minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang

Potensi daerah lain yang tidak kalah menarik merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi. Efisiensi pembiayaan investasi maupun pengembalian investasi menjadi faktor penentu bagi investor untuk menentukan lokasi tujuan investasi. Kurangnya promosi potensi investasi dan belum dikembangkannya sumber daya investasi yang berasal dari potensi lokal dan UMKM di Kota Magelang yang menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Magelang.

### **2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional**

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021–2026, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu **“Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- MISI I Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.
- MISI 2 Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- MISI 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif.
- MISI 4 Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
- MISI 5 Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, sebagai garda depan Urusan, menyelenggarakan urusan Penanaman Modal memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-3 yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif dan misi ke-4 yaitu : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Dalam meningkatkan pelayanan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Sistem Informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan belum dipahami secara menyeluruh oleh perangkat daerah teknis dan masyarakat.
- b. Kurangnya sinergitas perangkat daerah teknis dalam pelaksanaan pelayanan perizinan terintegrasi
- c. Terbatasnya potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban LKPM.

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Tersedianya SDM yang membidangi teknologi informasi yang mendukung pengembangan sistem informasi untuk layanan publik maupun internal perangkat daerah.
- b. Terselenggaranya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dapat melayani masyarakat dalam satu tempat dan merupakan pilot project pelaksanaan MPP Digital.
- c. Tersedianya regulasi penanaman modal yang dapat menarik minat investor dan berkembangnya promosi digital maupun industri kreatif yang berpotensi untuk meningkatkan investasi sehingga tidak hanya mengandalkan dari investor dengan skala besar.
- d. Tersedianya fasilitas pendukung pelayanan secara lengkap baik dari sarana prasarana, SKM, tindak lanjut pengaduan, layanan pendampingan dan konsultasi.
- e. DPMPSTP Menjadi pilot project WBK

#### **2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024**

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, inovatif dan berintegritas antara lain dengan adanya inovasi penerapan ISO 37001 merupakan sebuah standar internasional yang dirilis sejak 2016, yang mengatur tentang sistem manajemen anti penyuapan atau yang dikenal dengan istilah SMAP. Dengan memiliki sertifikasi di bidang ini, organisasi secara eksplisit ingin mengungkapkan komitmennya terhadap anti penyuapan, sehingga dengan cara yang sama organisasi akan menuntut setiap pihak yang berhubungan dengannya (stakeholder) untuk menjalankan komitmen serupa. Sistem manajemen anti suap memberikan panduan kepada organisasi untuk mengeliminasi setiap tindakan yang mengarah pada bentuk-bentuk penyuapan, baik secara keuangan maupun non keuangan.
- c. Membangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah teknis dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tatacara pengajuan izin dan kewajiban LKPM.
- e. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dan tanggungjawab pelaksanaan penanaman modal melalui inovasi klinik LKPM(KLIK) dan Asistensi Pelaporan dan Input LKPM secara online (APELIN) yang terus dioptimalkan.
- f. Membangun sinergitas dengan pihak swasta untuk menggali potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor.
- g. Optimalisasi digitalisasi pelaksanaan pelayanan internal maupun eksternal dengan mewujudkan MPP Digital dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal maupun internal. Salah satu inovasi untuk dapat memberikan informasi yang lebih optimal kepada masyarakat adalah melalui inovasi Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi (SIPPOINT).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 6 program dan 13 kegiatan. Serta 1 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024**  
**Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

lembar..... dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Magelang	Presentase Penerbitan PNP yang sesuai dengan SOP	94.5%	656.638.084	Program Pelayanan Penanaman Modal	Kota Magelang	Prosentase Penerbitan PNP yang sesuai dengan SOP	94.5%	660.987.650	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100%	656.638.084	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani	100%	660.987.650	
2	Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi PM	Kota Magelang	Prosentase Pemanfaatan Data, Informasi dan sistem Informasi PM	10%	58.185.000	Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi PM	Kota Magelang	Prosentase Pemanfaatan Data, Informasi dan sistem Informasi PM	10%	48.825.000	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran
	Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah	Kota Magelang	Persentase Pengelolaan Data, Informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	90%	58.185.000	Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah	Kota Magelang	Persentase Pengelolaan Data, Informasi dan sistem informasi yang terintegrasi	90%	48.825.000	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		secara elektronik			
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Kota Magelang	Prosentase Cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100%	4.548.438.655	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Kota Magelang	Prosentase Cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	100%	4.315.460.987	Diperlukan adanya pendampingan dalam penyusunan laporan akuntabilitas OPD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	7 Dokumen	24.811.600	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	7 Dokumen	13.105.500	Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan administrasi keuangan OPD	15 Laporan	3.459.336.026	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kota Magelang	Jumlah Laporan administrasi keuangan OPD	15 Laporan	3.302.260.157	Optimalisasi pengelolaan laporan dan realisasi keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	3.738.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	3.738.600	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Kegiatan	141.320.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat	7 Kegiatan	124.534.730	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Daerah			anggaran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Kegiatan	723.121.016	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Jumlah kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Kegiatan	708.690.000	Optimalisasi fasilitasi penunjang urusan pemerintahan daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	4 Jenis	190.620.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	4 Jenis	163.132.000	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran
4	Program Pengembangan Iklim PM	Kota Magelang	Prosentase Investor PMA/PMDN	100%	334.245.000	Program Pengembangan Iklim PM	Kota Magelang	Prosentase Investor PMA/PMDN	100%	166.000.000	Dilaksanakan optimalisasi penyesuaian regulasi penanamn modal dan kajian HBU potensi dan peluang investasi
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase kesesuaian pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM dengan SOP	100%	74.460.000	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase kesesuaian pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan PM dengan SOP	100%	39.000.000	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	60%	259.785.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	20%	127.000.000	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran
5	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Magelang	Prosentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	435.359.552	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Magelang	Prosentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	270.167.400	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran
	Penyelenggaraan Promosi PM yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Prosentase Peningkatan jumlah kepedinan (LOI)	10%	435.359.552	Penyelenggaraan Promosi PM yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Prosentase Peningkatan jumlah kepedinan (LOI)	10%	270.167.400	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran
6	Program Pengendalian Pelaksanaan PM	Kota Magelang	Prosentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan	25%	99.299.052	Program Pengendalian Pelaksanaan PM	Kota Magelang	Prosentase Pelaku Usaha yang memenuhi peraturan perundang-undangan	30%	91.919.700	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran DAU
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	60%	99.299.052	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	60%	91.919.700	Dilaksanakan efisiensi kegiatan menyesuaikan pagu anggaran DAU

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang yang melaksanakan pelayanan publik berupaya untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Layanan terbaik adalah memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai salah upaya untuk dapat memberikan layanan terbaik tersebut dilaksanakan Focus Grup Discussion untuk menjaring aspirasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan yang diharapkan dan dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan kerja perangkat daerah. Di dalam pelaksanaan Focus Grup Discussion tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perizinan, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam Renstra dan RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Selain penjangkaran saran dan masukan dari stakeholder terkait, DPMPTSP juga mengakomodir usulan dari konsultasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, yaitu usulan pada konsultasi publik anak.

Usulan Program kegiatan melalui Focus Grup Discussion (FGD) dan hasil konsultasi publik anak pada tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku**  
**Keperentingan Tahun 2024 Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Magelang	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani secara elektronik	<b>2000 Pelaku Usaha</b>	Perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Magelang	Jumlah layanan konsultasi dan penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti	<b>100 Pelaku Usaha</b>	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	<b>8 Dokumen</b>	Perlu adanya sosialisasi Investasi kepada anak-anak

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV atau tahap terakhir dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, dengan tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dan fokus pada penyelesaian target-**

**target pembangunan”**. Selanjutnya Arah kebijakan tahun 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; (3) Penguatan Daya Saing Usaha; (4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; (5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; (7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan (8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Indikator sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,7 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0–5,7 persen.
3. Tingkat Kemiskinan 6,5–7,5 persen.
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,99–74,02.

Pembangunan Jawa Tengah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tema fokus pembangunannya ialah **“Pemantapan Perekonomian**

**dan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung oleh penguatan struktur yang mendukung keberlanjutan”**. Lima prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; 2. Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan; 3. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia; 4. Penyediaan Infrastruktur, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Terhadap Kelompok Rentan; 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang**

<b>No</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Kota Magelang</b>
1	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penguatan Daya Saing Usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan	Penguatan peran masyarakat sebagai mitra, Perluasan perlindungan sosial dalam penanganan fakir miskin, Penguatan daya saing daerah
2	Peningkatan	Peningkatan	Pemantapan

	kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan	Kualitas Sumber daya Manusia	ketahanan sosial budaya dan toleransi masyarakat, perwujudan layanan publik prima, pemantapan kualitas hidup dan kapasitas SDM.
3	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi	Penyediaan Infrastruktur, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Terhadap Kelompok Rentan	Penguatan dan pengembangan kawasan strategis
4	Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Pelaksanaan pemilu 2024.	Perbaikan tata kelola pemerintahan	Pemantapan ketahanan nasional budaya dan toleransi masyarakat

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang**

Dalam Mendukung visi dan misi Walikota Magelang, tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Penanaman Modal masuk pada misi ke-3 yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif dan misi ke-4 yaitu : Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan, sedangkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang berdasarkan Misi ke 3 dan 4 Walikota dan Wakil Walikota Magelang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Formula Hitung</b>	<b>Target Pada tahun 2024</b>
1	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat transparan		IKM Pelayanan Perizinan	Hasil Perhitungan dari 9 Unsur Sesuai Juknis dari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tahun n	84
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Rata-Rata Lama Waktu Pelayanan Perijinan	Jumlah waktu pelayanan perizinan tahun n/ Jumlah izin tahun n	3,5
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD		Hasil Penilaian SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP	A
		Meningkatnya Nilai AKIP	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	82
3	Meningkatnya investasi		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA/PMDN	Jumlah investasi th n – Jumlah investasi tah(n-1)/ Jumlah investasi th n x 100%	16
		Meningkatnya investor dan penyerapan tenaga kerja	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN tahun n	3

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2024 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Magelang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang pada tahun 2024 disusun sebanyak 6 program dan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Magelang**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								8.712.254.820
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	100%	4.315.460.987	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	6.818.521.820
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	7 Dokumen	13.105.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	24.811.600
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	2 Dokumen	5,018,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Dokumen	1,148,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.400.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPPTSP, KOTA	1 Dokumen	1,284,100	Dana Transfer Umum - Dana		1 Dokumen	2.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perubahan RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	MAGELANG			Alokasi Umum			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Dokumen	1,308,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Dokumen	1,299,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Laporan	3,045,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	7.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan OPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	15 Laporan	3.302.260.157	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Laporan	3.806.950.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	25 orang	3,292,829,157	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25 orang/Bulan	3.795.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Laporan	1,998,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tahun SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	13 Laporan	6,542,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		13 Laporan	8.700.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Laporan	891,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.050.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 kegiatan	3.738.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	4.112.460
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	12 Laporan	3.738.600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Laporan	4.112.460
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	7 Kegiatan	124.534.730	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7 Kegiatan	182.200.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	7 Paket	1,883,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7 Paket	3.300.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	5 Paket	34,999,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Paket	51.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	7 Paket	8,122,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7 Paket	10.300.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	3 Dokumen	4,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	5.700.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	23 Paket	26,083,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		23 Paket	39.500.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	12 Laporan	3,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	12 Laporan	45,944,930	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	67.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	3 Kegiatan	708. 690.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Kegiatan	794.800.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	12 Laporan	4,630,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5.800.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	12 Laporan	514,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	566.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	12 Laporan	189,099,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	223.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		yang Disediakan							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	4 Jenis	163.132.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Jenis	192.194.139
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	18 Unit	90,019,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		18 Unit	139.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	5 Unit	42,406,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Unit	133.804.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Unit	750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Unit	4.690.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihar	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	10 Unit	29,957,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Unit	53.700.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor PMA/PMDN	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	100%	166.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	415.010.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	100%	39.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	84.950.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	1 Dokumen	23,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	0
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di Daerah	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	10 Dokumen	15.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan usaha	84.950.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	60%	127.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		80%	330.060.000
	Penyusunan peta potensi Investasi Kab/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	2 Dokumen	127.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	243.600.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG , PROVINSI JAWA TENGAH	100%	270,167,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	677.900.000
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah kepedinan (LOI)	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	10%	270,167,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10%	677.900.000
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	8 Dokumen	270,167,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	677.900.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non	DPMPPTSP, KOTA	94,5 %	660.987.650	Dana Transfer Umum - Dana		95%	847.589.994

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	MAGELANG			Alokasi Umum			
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non - Perizinan yang dilayani	DPMPSTSP, KOTA MAGELANG	100%	660.987.650	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95%	443.937.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPSTSP, KOTA MAGELANG	2 Kegiatan Usaha	79,192,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Kegiatan Usaha	30.000.000
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPSTSP, KOTA MAGELANG	3000 Pelaku Usaha	443,626,520	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3000 Pelaku Usaha	600.000.000
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPSTSP, KOTA MAGELANG	100 Pelaku Usaha	53,904,320	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Orang	68.103.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	100 Kegiatan usaha	84,264,710	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Kegiatan Usaha	149.486.194
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang - undangan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	25%	91.919.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30%	115.000.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	60%	91.919.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		65%	115.000.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	360 Pelaku Usaha	20,166,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		360 Pelaku Usaha	30.000.000
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi dat, profil dan informasi kegaitan usaha dari Pelaku	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	100 Kegiatan Usaha	71,753,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Kegiatan Usaha	85.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Usaha. Dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.							
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	10%	48,825,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10%	70.000.000
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan data , informasi dan sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	90%	48,825,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95%	70.000.000
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	DPMPPTSP, KOTA MAGELANG	5 Dokumen	48,825,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	70.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2024.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan :

**Tabel 4. 1**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan tercapainya akuntabilitas kinerja OPD									100%	4.311.722.387
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	5.528.200	-	7.983.300	4	6.853.300	1	3.061.400	7 Dokumen	13.105.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.568.500		885.000	2	2.565.200			2 Dokumen	5.018.900
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan				337.300	1	811.300			1 Dokumen	1.148.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1	1.284.100			1 Dokumen	1.284.100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.308.300							1 Dokumen	1.308.300
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							1	1.299.900	1 Dokumen	1.299.900
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	2.252.700		429.000		182.000		182.000	1 Laporan	3.045.700

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	4	869.127.235	3	1.004.646.597	5	755.277.878	3	673.208.447	15 Laporan	3.302.260.157
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang	865.493.735	21 orang	1.002.585.397	21 orang	753.177.078	21 orang	671.572.947	25 orang	3.292.829.157
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.998.000							1 Laporan	1.998.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	1.635.500	3	1.635.500	4	1.635.500	3	1.635.500	13 Laporan	6.542.000
	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	-		-	425.700	1	465.300	-		1 Laporan	891.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23	12.445.975	23	4.545.975	23	4.545.975	23	4.545.975	23 Paket	26.083.900
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3	825.000	3	825.000	3	825.000	3	825.000	12 Laporan	3.300.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	11.486.232	3	11.486.232	3	11.486.232	3	11.486.234	12 Laporan	45.944930
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	177.172.500	3	177.172.500	3	177.172.500	3	177.172.500	3 Kegiatan	708.690.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	1.157.625	3	1.157.625	3	1.157.625	3	1.157.625	12 Laporan	4.630.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	128.740.000	3	128.740.000	3	128.740.000	3	128.740.000	12 Laporan	514.960.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	47.274.875	3	47.274.875	3	47.274.875	3	47.274.875	12 Laporan	189.099.500
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang dipelihara	4	47.656.250	4	46.906.250	4	36.063.250	4	33.106.250	4 Jenis	163.132.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	22.504.750	18	22.504.750	18	22.504.750	18	22.504.750	18 Unit	90.019.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	10.601.500	5	10.601.500	5	10.601.500	5	10.601.500	5 Unit	42.406.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	1	750.000							1 Unit	750.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	13.800.000	4	13.800.000	2	2.957.000			10 Unit	29.957.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor PMA/PMDN	20%	16.195.000	50%	21.566.000	75%	124.769.000	100%	3.470.000	100%	415.010.000
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah kab kota	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PM dengan SOP	-	7.800.000	-	1.736.000	-	25.994.000	100%	3.470.000	100%	39.000.000
	Penetapan kebijakan daerah mengenai	Jumlah Perda/Provinsi dalam Pemberian	-	-	-	1.000.0000	1	22.500.000	-	0	1 Dokumen	23.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal										
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	-	7.800.000	4	736.000	6	3.494.000	-	3.470.000	10 Dokumen	15.500.000
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Persentase wilayah yang telah teridentifikasi peta potensinya	-	8.395.000	-	19.830.000	60%	98.775.000	-	-	60%	127.000.000
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kab/kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	8.395.000	1	19.830.000	1	98.775.000	-	-	2 Dokumen	127.000.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase LOI yang ditindaklanjuti		21.601.430		125.762.530		107.024.130	100%	15.779.310	100%	270.167.400
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan jumlah kepeminatan (LOI)		21.601.430		125.762.530		107.024.130	10%	15.779.310	10%	270.167.400
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		21.601.430		125.762.530		107.024.130	8	15.779.310	8 Dokumen	270.167.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Yang Sesuai Dengan SOP	95%	134.202.724	95%	140.076.324	95%	106.479.424	95%	280.261.780	95%	660.987.650
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non -Perizinan yang dilayani	100%	134.202.724	100%	140.076.324	100%	106.479.424	100%	62.388.864	100%	660.987.650
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	450	96.971.000	450	95.808.000	500	71.213.000	600	179.634.520	3000 Pelaku Usaha	443.626.520
	Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan	20	19.266.178	20	22.866.178	30	19.265.178	30	22.866.178	100 Kegiatan Usaha	84.264.710

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
		usaha dari pelaku usaha										
	Penyediaan dan Pengelolaan layanan konsultasi Perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25	16.094.546	25	18.128.146	25	14.128.146	25	5.587.082	100 Orang	53.904.320
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	1.871.000	-	3.274.000	1	1.873.100	2	72.174.000	2 Kegiatan Usaha	79.192.100
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memenuhi peraturan perundang - undangan	-	23.000.000	5%	37.500.000	10%	27.500.000	10%	3.919.721	25%	91.919.700
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	10%	23.000.000	20%	37.500.000	10%	27.500.000	20%	3.919.721	60%	91.919.700
	Bimbingan Teknis	Jumlah Pelaku	60	3.000.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	2.166.300	360	20.166.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	kepada pelaku usaha	Usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko									Pelaku Usaha	
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penialaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha.	25	20.000.000	30	30.000.000	30	20.000.000	15	1.753.400	100 Kegiatan Usaha	71.753.400
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan pemanfaatan data, Informasi dan Sistem Informasi PM	-	8.000.000	-	35.000.000	-	5.825.000	10%	-	10%	48.825.000
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang	Persentase pengelolaan data , informasi dan sistem informasi	85%	8.000.000	90%	35.000.000	95%	5.825.000	100%	-	100%	48.825.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2024 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif						
1	2	3	4		5		6		7		8	
	Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	yang terintegrasi secara elektronik										
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	8.000.000	5	35.000.000	5	5.825.000	5	-	5 Dokumen	48.825.000

## **BAB V PENUTUP**

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang tahun 2024.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kota Magelang maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2024 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan investasi dan kualitas pelayanan publik di Kota Magelang.

Magelang, Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**KHUDHOIFAH, SH, MM**  
NIP. 19650827 199003 2 005  
Pembina Utama Muda